

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarto, L. P. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Objek Asuransi Barang Milik Negara. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan ...*, 1(2), 83–93.
<http://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/27%0Ahttps://journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/download/27/17>
- Agustina, E. (2021). PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE. *Solusi*, 19(1), 105-117.
- Amalinda Lailatul Choiriah. (2015). Mekanisme Penjualan BMN dengan Tindak Lanjut Penjualan Melalui Lelang di KPKNL Jember. *Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember*, 3(3), 96–104.
- Amiri, K. (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance. *Potret Pemikiran*, 20(2).
<https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>
- Arthawani, G. (2021). Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).
- Darwis, H. (2009). Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13(3), 418–430.
- Demak, I. N. K., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(02).
- DIMAS, M., Panjaitan, S. P., & Basyeban, A. N. (2018). *PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA/DAERAH YANG KADALUARSA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Dwi, S. (2015). *Penyelesaian Kerugian Negara Non Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan*. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anggaran Dan

Perbendaharaan.

- Febriana, E. N., Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. *e-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 131-149.
- Febriani, N. (2016). PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. *Hukum, Jurnal Ilmu Universitas, Pascasarjana Kuala, Syiah*, 4(1), 19-24.
- Hamidah, N., & Supriyanto, E. (2020). Penanganan Penghapusan Barang Persediaan Sudah Mati Atau Barang Non-Aktif Di Kantor Cabang Utama Pt Angkasa Pura Ii *Jurnal Industri Elektro Dan* <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/view/218>
- Hanis, M. (2011). *The application of Public Asset Management in Indonesian Local Government: A Case Study in South Sulawesi Province*. June, 1-2.
- Hutapea, E. (2018). *Pemerintah Telusuri “Hilang”-nya 56.000 Aset Negara*. Kompas.Com. <https://properti.kompas.com/read/2018/10/19/003037221/pemerintah-telusuri-hilang-nya-56000-aset-negara>
- Jayanti, R. S., Soemitro, R. A. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan Kondisi Rusak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(1), 46-57.
- Juliani, H. (2017). Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain. *Law Reform*, 13(2), 234. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16158>
- Karambut, A. M., Lasewa, R., & Gamaliel, H. (2018). Ipteks Prosedur Penghapusan Bmn Oleh Kpknl Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2), 294241.
- Kemala, F. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara studi kasus pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(2), 38-47.
- Kiay Demak, I. N., Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 548-557. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19737.2018>

- LISTYAWATI, A. Optimalisasi proses penghapusan BMN melalui penyusunan SOP dan digitalisasi monitoring penghapusan BMN di Lingkungan Badan Keamanan Laut RI: Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.
- Mania, S. (2008). Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(2), 220–233. <https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n2a7>
- Manurung, J. (2010). *Analisis Yuridis Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Pemerintah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40149>
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 43–52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Nasrudin, E. (2015). Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau bera. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 13(2), 45.
- Ningsih, M. (2020). *Manajemen penghapusan sarana pendidikan di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Menteri Keuangan Republik*

Indonesia Nomor 781 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>

Yasir, R., Rani, F. A., & Din, M. (2019). Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 16/PID.SUS-TPK /2015/PN.BNA dan Putusan Nomor: 23/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA). *Syiah Kuala Law Journal*, 3(15), 281–295.

Zahdanti, S., & Raharjo, T. (2021). DINAMIKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERWAWASAN GENDER (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN dan LELANG SURAKARTA). *Indonesian Rich Journal*, 2(1), 41-48.

Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK NEGARA DI IPDN KAMPUS JATINANGOR. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 311-325.